

Nomor	: 005/SOP-BC/KPP MC /2009	Tanggal	: 30 Maret 2009
Revisi	: 01	Tanggal	: 22 Juli 2010



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA CUKAI**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA
BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) PENGUSAHA PABRIK
ETIL ALKOHOL**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-03/BC/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol / Minuman Mengandung Etil Alkohol, Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol dan Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-07/BC/2009 tentang Formulir Isian Registrasi Cukai.

DESKRIPSI :

1. Etil Alkohol (EA) adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik Etil Alkohol adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik EA.
3. Pengusaha Pabrik EA adalah orang yang mengusahakan pabrik barang kena cukai berupa EA.
4. Pabrik EA adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan dan/atau untuk mengemas etil alkohol dalam kemasan untuk penjualan eceran.
5. Pengusaha Pabrik EA yang telah mendapatkan izin dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan, wajib memiliki NPPBKC untuk kepentingan pengawasan Barang Kena Cukai dan penerimaan negara.
6. Sebelum mengajukan permohonan NPPBKC, pengusaha pabrik EA terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi untuk dilakukan wawancara dan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, dengan melampirkan salinan/fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri, salinan/fotokopi IMB, gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha, serta salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan.
7. Setelah dilakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran data pemohon sebagai penanggung jawab dan data dalam lampiran pemohon yang dibuatkan Berita Acara Wawancara oleh pejabat bea dan cukai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha. Atas hasil pemeriksaan lokasi, pejabat bea dan cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disertai gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima. BAP ini digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal BAP.
8. Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, pengusaha pabrik EA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi sesuai contoh format PMCK-6 disertai BAP, Surat pernyataan bermaterai cukup bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama importir yang bersangkutan memiliki kesamaan dengan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC dan persyaratan administrasi lainnya.
9. Terhadap permohonan untuk memperoleh NPPBKC sebagaimana dimaksud pada butir 8, maka :
 - a. kepala kantor atas nama Menteri Keuangan mengabulkan atau menolak permohonan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap;
 - b. dalam hal permohonan dikabulkan, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian NPPBKC;

- c. dalam hal permohonan ditolak, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan memberikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- 10. SOP Pelayanan Pemberian NPPBKC Pengusaha Pabrik EA dimulai sejak permohonan diterima kepala kantor untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, wawancara, pemeriksaan lokasi, pengajuan PMCK-6, pemeriksaan persyaratan sampai dengan penerbitan keputusan pemberian NPPBKC atau surat penolakan.
- 11. Unit pelaksana SOP Pelayanan Pemberian NPPBKC Pengusaha Pabrik EA ini adalah KPPBC Tipe Madya Cukai.

PERSYARATAN :

1. Permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan:
 - a. salinan/fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri;
 - b. gambar denah, lokasi, bangunan atau tempat usaha;
 - c. salinan/fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - d. salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan.
2. Lokasi, bangunan atau tempat usaha untuk pabrik harus memenuhi ketentuan :
 - a. tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin;
 - b. tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal;
 - c. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri;
 - d. memiliki luas bangunan paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter persegi;
 - e. memiliki ruang laboratorium dan peralatannya;
 - f. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang dipakai untuk membuat etil alkohol;
 - g. memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan bak atau tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk menampung EA yang telah selesai dibuat;
 - h. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong;
 - i. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan hasil akhir yang bukan barang kena cukai dalam hal pabrik dengan proses produksi terpadu;
 - j. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menampung EA yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum (spiritus bakar);
 - k. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menampung produk sampingan;
 - l. memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai;
 - m. memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat bea dan cukai dalam melakukan pekerjaan atau pengawasan; dan
 - n. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.
3. Pengusaha Pabrik EA mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi sesuai contoh format PMCK-6, disertai persyaratan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah daerah setempat;
 - b. surat perjanjian sewa menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun, dalam hal pengusaha pabrik EA bukan pemilik bangunan;
 - c. izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan;
 - d. izin usaha industri dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian;
 - e. izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
 - f. izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
 - g. izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja;
 - h. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
 - j. kartu tanda pengenalan diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan
 - k. akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum.
4. Pengusaha Pabrik EA yang telah mendapatkan NPPBKC harus memasang papan nama yang memuat paling sedikit nama perusahaan, alamat, dan NPPBKC dengan ukuran lebar paling kecil 60cm dan panjang paling kecil 120cm.
5. Pengusaha Pabrik EA yang mendapatkan NPPBKC harus mengisi formulir isian registrasi cukai, guna penyusunan database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BIAYA : Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN :

Pelayanan Pemberian NPPBKC bagi Pabrik EA dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, yang dibagi dalam 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu:

1.	Tahap I	:	Wawancara dan pemeriksaan pemenuhan persyaratan lokasi pabrik EA hingga pembuatan BAP disertai gambar denah sejak surat permohonan pemeriksaan lokasi diterima	:	30	Hari
2.	Tahap II	:	Proses analisis permohonan dan lampiran sampai dengan terbitnya surat keputusan pemberian NPPBKC/surat penolakan sejak PMCK-6 diterima secara lengkap	:	30	Hari

Mengetahui:
Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttt-

Kamil Sjoeib
NIP 060044480

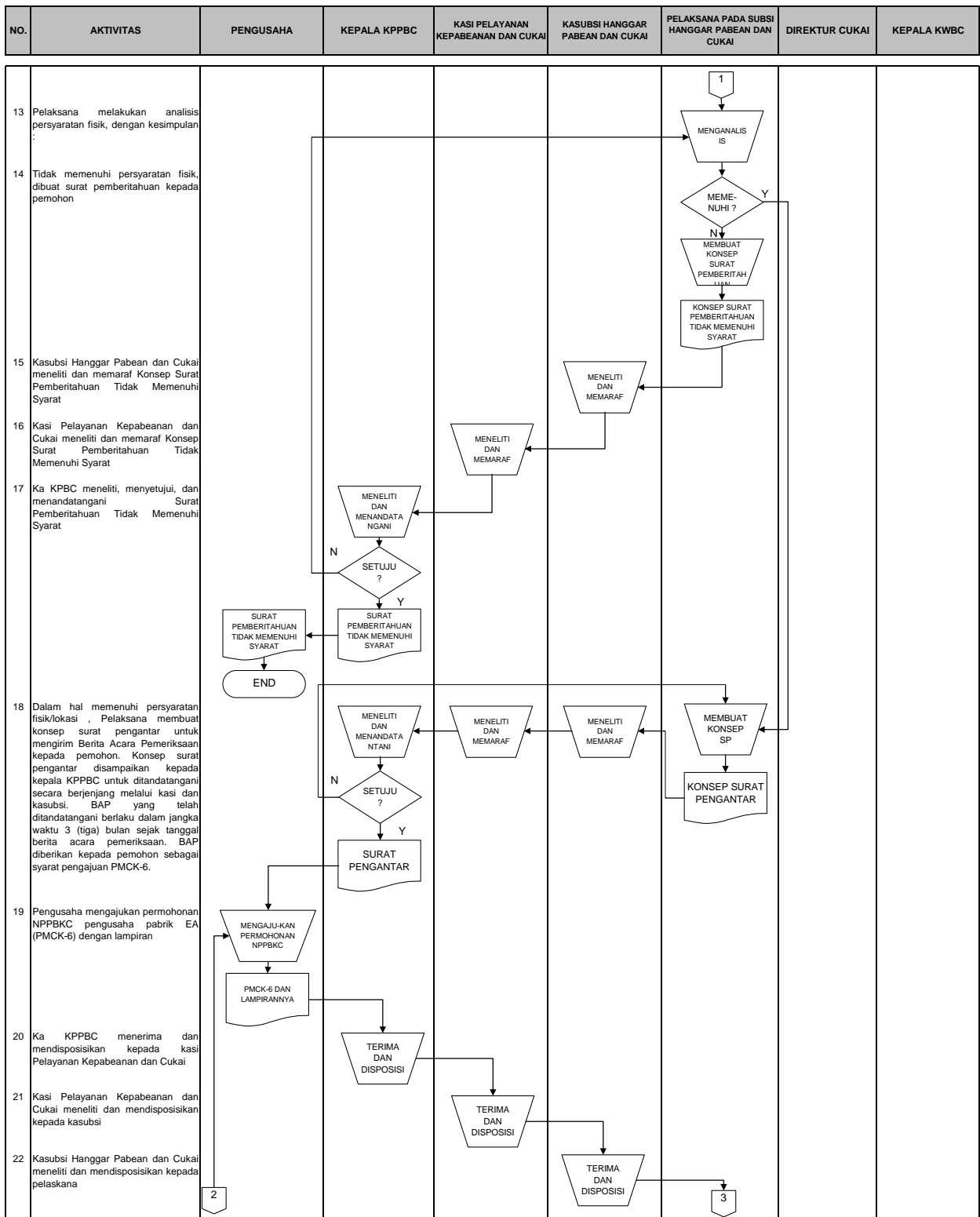


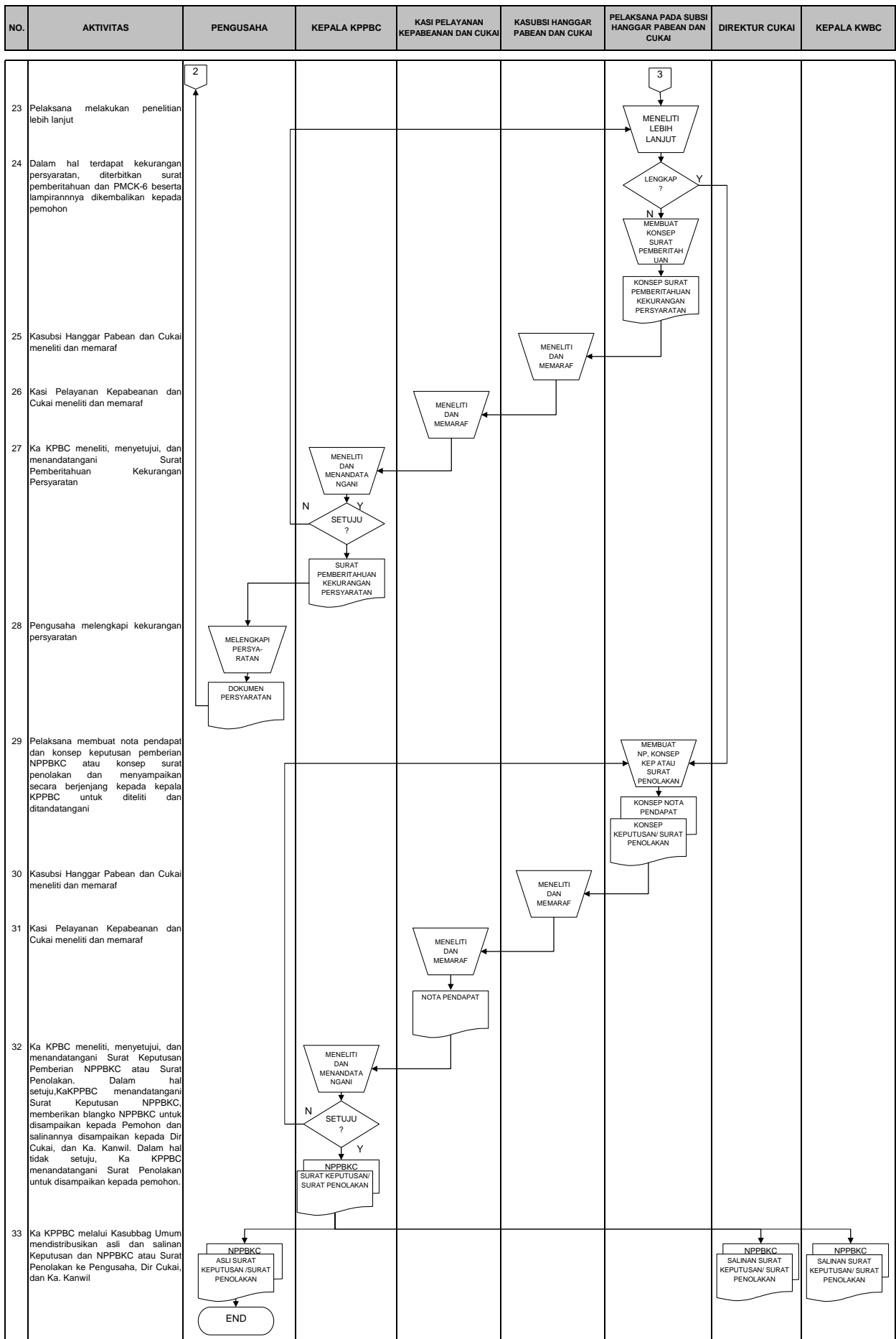
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA CUKAI

NOMOR	: 005/SOP-BC/KPP MC /2009
TANGGAL	: 30 Maret 2009
REVISI	: 01
TANGGAL	: 22 Juli 2010

STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PEMBERIAN
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL

NO.	AKTIVITAS	PENGUSAHA	KEPALA KPPBC	KASI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI	KASUBSI HANGGAR PABEAN DAN CUKAI	PELAKSANA PADA SUBSI HANGGAR PABEAN DAN CUKAI	DIREKTUR CUKAI	KEPALA KWBC
1.	Pengusaha mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan fisik atas lokasi dengan disertai gambar denah lokasi/bangunan.	START BERKAS PERMOHONAN						
2.	Ka KPPBC meneliti dan mendisposisikan permohonan kepada Kasi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai		TELITI DAN DISPOSISI					
3.	Kasi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai meneliti dan mendisposisikan			TELITI DAN DISPOSISI				
4.	Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai meneliti dan mendisposisikan kepada pelaksana				TELITI DAN DISPOSISI			
5.	Pelaksana meneliti lebih lanjut berkas Surat Permohonan dan membuat Nota Hasil Penelitian.					MENELITI LEBIH LANJUT NOTA HASIL PENELITIAN		
6.	Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai meneliti Nota Hasil Penelitian, apabila persyaratan telah dipenuhi maka dilakukan wawancara dengan pemohon dan hasil wawancara dituangkan dalam Berita Acara Wawancara. Berdasarkan surat permohonan dan lampirannya				MENELITI NHP & MELAKUKAKAN WAWANCARA BAW			
7.	Pelaksana meneliti dan membuat Konsep Surat Tugas pemeriksaan fisik, kemudian disampaikan kepada kepala Subseksi					TELITI DAN MEMBUAT KONSEP ST KONSEP SURAT TUGAS		
8.	Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai meneliti dan memaraf Konsep Surat Tugas pemeriksaan fisik				MENELITI DAN MEMARAF			
9.	Kasi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai meneliti dan memaraf Konsep Surat Tugas pemeriksaan fisik			MENELITI DAN MEMARAF				
10.	Ka KPBC meneliti, menyetujui, dan menandatangani Surat Tugas pemeriksaan fisik		TELITI DAN MENANDATANGANI SETUJU ? SURAT TUGAS					
11.	Pelaksana menerima Surat Tugas, melakukan pemeriksaan fisik					MENERIMA DAN PERIKSA FISIK		
12.	Pelaksana menuangkan hasil pemeriksaan kedalam Berita Acara Pemeriksaan. BAP yang telah ditandatangani berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal berita acara pemeriksaan. BAP diberikan kepada pemohon sebagai syarat pengajuan PMCK-6.					MEMBUAT BAP BAP		





Mengetahui:
Sekretaris Direktorat Jenderal

-tt-

Kamil Sjoeb
NIP 060044480